



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2022**



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan prioritas pembangunan Tahun 2023 yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

2.5 Capaian Kinerja Lainnya

2.5.1 Kesehatan Keluarga

Keluarga adalah suatu lembaga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Karena merupakan unit dari masyarakat, keluarga memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Tinggi rendahnya derajat kesehatan keluarga akan sangat menentukan tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

Sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari masyarakat, keluarga memiliki peran sangat yang sangat penting dalam perbaikan status kesehatan, berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan dan produktifitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi, dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Didalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan, hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

a. Kesehatan Ibu

Kesehatan ibu adalah masalah pembangunan global. Dibeberapa negara, khususnya negara berkembang dan negara belum berkembang, para ibu masih memiliki resiko tinggi ketika melahirkan. Situasi ini kemudian mengajak kalangan internasional untuk mengatasi permasalahan kesehatan ibu tersebut. Komunitas global telah bersepakat bahwa seorang ibu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini tidak hanya mampu menilai program kesehatan ibu, tetapi juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik

4. *Belum optimalnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan Lintas Sektor dalam meningkatkan PHBS baik PHBS Rumah Tangga maupun tatanan lainnya.*

Promosi kesehatan merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan kesehatan. Salah satu bentuk dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yaitu terbentuknya **Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)** yang terorganisir dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif.

Tujuan dari desa siaga aktif yaitu mempercepat terwujudnya masyarakat desa/kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat. Posyandu merupakan salah satu UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB.

Selain faktor lingkungan, perilaku juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Dengan berperilaku sehat maka akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Secara teoritis faktor perilaku memiliki andil 30-35% terhadap derajat kesehatan. Sedangkan dampak dari perilaku terhadap derajat kesehatan cukup besar, maka diperlukan berbagai upaya untuk merubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, salah satunya melalui Program Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keberhasilan program pengembangan PHBS sangat ditentukan peran serta lintas sektor di luar sektor kesehatan, partisipasi dunia usaha dan peran serta masyarakat itu sendiri.

Kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kegiatan PHBS masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh:

- 1) **Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor maupun unsur terkait.**
- 2) **Anggapan bahwa kegiatan pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab sektor kesehatan.**
- 3) **Kesadaran masyarakat terhadap PHBS masih kurang, masyarakat baru merasa**

sumber daya manusia kesehatan,
Faktor penghambat :

- ◆ Minat SDM untuk mengikuti pelatihan masih kurang
- ◆ Minimnya pelatihan yang dilaksanakan di kabupaten

3. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan Faktor Penghambat :

- ◆ Manajemen puskesmas masih bersifat manual.
- ◆ Beberapa puskesmas belum sesuai standar permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas.

4. Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan, faktor Penghambat :

- ◆ Pencatatan dan Pelaporan sarana dan prasarana serta alat kesehatan sudah menggunakan Aplikasi ASPAK yang dikeluarkan oleh pusat update data di puskesmas tidak tepat waktu setiap tahunnya.

5. Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan prevalensi stunting, faktor penghambat :

- ◆ Sosial budaya masyarakat yang masih ada mempercayai mitos
- ◆ Anggapan bahwa permasalahan kesehatan adalah tanggung jawab dinas kesehatan
- ◆ Peran serta masyarakat masih kurang dalam urusan kesehatan

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, Faktor Pendorongnya:

- ◆ Pelatihan-pelatihan bersifat Tata Muka maupun online

3. Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, Faktor pendukung :

- ◆ 12 Puskesmas sudah tersertifikasi akreditasi.
- ◆ Akses internet di setiap puskesmas sudah tersedia

4. Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan Faktor Pendukung :

- ◆ Permenkes nomor 43 tentang puskesmas, yang memuat standar pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

5. Peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan prevalensi stunting, Faktor pendukung

- ◆ Adanya kebijakan Dana Desa untuk mengalokasikan program penanganan stunting
- ◆ Terbentuknya Tim Penanggulangan Stunting di Kabupaten.
- ◆ 13 kecamatan sudah memiliki kebijakan Promosi Kesehatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Natuna, untuk mencapai tujuan tersebut berpedoman pada Misi Bupati Natuna yang ke-1 yaitu **"Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM"** dan Misi ke-6 yaitu **"Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (smart bureaucracy)"**

Tabel 4.1
Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2022-2026

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Tahun Ke-					Ket
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	64.95	64.95	65.16	65.51	66.85	66.29	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Predikat Nilai Kinerja Dinas Kesehatan	A	A	A	A	A	A	
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,44	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	

Berdasarkan tujuan tersebut kemudian ditetapkan 5 sasaran dinas kesehatan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Indikator : - Menurunnya Angka Kesakitan dari 72.90 (2021) menjadi 70.98 (2026)

Sasaran 2 : Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Secara Menyeluruh

Indikator : - Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat dari 0.22 (2021) menjadi 0.8 (2026)

- Meningkatkan Persentase Puskesmas Yang Meningkatkan Strata

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
2022-2026

VISI (Bupati Natuna) : "Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural"			
MISI (bupati) ke - 2 "Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	* Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit dan peningkatan cakupan deteksi dini. * Peningkatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) di Kecamatan yang IDL nya belum mencapai 80% * Penyelenggaraan pandu PTM di puskesmas * Peningkatan Posbindu aktif *	* Mengggalakkan gerakan masyarakat untuk hidup sehat * Penguatan tata laksana penanganan penyakit * Pengembangan real time surveilans * Peningkatan kapasitas SDM
	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Secara Menyeluruh	* Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau; * Peningkatan Strata Akreditasi	* Pembentukan PSC 119 serta pemenuhan sarana dan prasarana nya * Pelaksanaan Program PIS-PK yang disinergikan dengan Program

3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran program ini adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten Kota
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran program ini adalah sebagai berikut :

- a. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- b. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran program ini adalah sebagai berikut :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/kota
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program, kegiatan, rincian indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Kesehatan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	88,99	100	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	91,53	100	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	92,82	100	100	100	100	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	81,29	100	100	100	100	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42,94	100	100	100	100	100
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	4,77	100	100	100	100	100
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	52,86	100	100	100	100	100
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14,90	100	100	100	100	100
9	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3,92	100	100	100	100	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	226	100	100	100	100	100
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	73,94	100	100	100	100	100
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	46,63	100	100	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				1.2.2.1.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN BMHP YANG SESUAI STANDAR	40	40	600,000	45	600,000	50	600,000	55	600,000
				1.2.2.1.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Instalasi Farmasi	85	85	600,000	87	600,000	90	600,000	94	600,000
				1.2.2.1.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	600,000	1	600,000	1	600,000	1	600,000
				1.2.2.1.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA SESUAI STANDAR	82.7	92.8	690,000	93.3	680,000	100	945,000	100	755,000
				1.2.2.1.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	100	100	60,000	100	60,000	100	60,000	100	60,000
				1.2.2.1.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	44	46	60,000	49	60,000	52	60,000	54	60,000
				1.2.2.1.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100	280,000	100	250,000	100	450,000	100	250,000
				1.2.2.1.03.2.02.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	100	280,000	100	250,000	100	450,000	100	250,000

19	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	157,813,000.00	113,477,000.00	133,500,000.00	105,779,000.00	101,810,200.00	1,450,000.00	88,762,609.00	97,054,340.00	64.51	1.28	66.49	91.75
	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	157,813,000.00	113,477,000.00	133,500,000.00	105,779,000.00	101,810,200.00	1,450,000.00	88,762,609.00	97,054,340.00	64.51	1.28	66.49	91.75
20	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1,725,925,000.00	1,635,316,000.00	971,122,400.00	480,952,000.00	699,495,846.00	514,046,387.00	467,962,948.00	321,675,100.00	40.53	31.43	48.19	66.88
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	1,611,098,000.00	193,093,000.00	99,122,400.00	0.00	626,456,146.00	34,143,300.00	66,550,400.00	38.88	17.68	67.14	0.00	
	Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun				2,000,000.00			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran (DAK Bidang Non Fisik)	1,085,372,000.00	1,437,223,000.00	745,788,600.00	478,952,000.00	341,775,546.00	474,903,087.00	387,614,500.00	319,675,100.00	31.49	33.04	51.97	66.74
	Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)	114,827,000.00	0.00			73,039,700.00	0.00		63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD			18,267,252,000.00				16,984,161,248.00		0.00	0.00	92.98	0.00
	Pelayanan dan pendukung pelayanan			18,267,252,000.00				16,984,161,248.00		0.00	0.00	92.98	0.00
22	Program Pengawasan dan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan	0.00	203,548,000.00	188,526,000.00	38,164,000.00	0.00	74,905,400.00	85,662,150.00	28,547,000.00	0.00	36.80	45.44	74.80
	Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga	0.00	203,548,000.00	188,526,000.00	38,164,000.00	0.00	74,905,400.00	85,662,150.00	28,547,000.00	0.00	36.80	45.44	74.80
23	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	242,390,339.00	250,000,000.00	361,007,660.00	101,700,000.00	177,796,894.00	111,267,747.00	272,742,380.00	88,422,057.00	73.35	44.51	75.55	86.94
	Pelayanan kesehatan tradisional	242,390,339.00	250,000,000.00	361,007,660.00	101,700,000.00	177,796,894.00	111,267,747.00	272,742,380.00	88,422,057.00	73.35	44.51	75.55	86.94

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 155